



LAPORAN KEUANGAN TA 2024 AUDITED

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

LK ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Andi Saguni, MA

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KUASA
PENGGUNA ANGGARAN KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN
KESEHATAN**

Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 16 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Andi Saguni, MA

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp49.937.226.426,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sebesar Rp4.324.787.556.975,- atau mencapai 75,63 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.718.626.370.000,-.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 5.492.261.211.436,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp136.824.000.174,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 4.792.408.434.474,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp563.028.776.788,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp1.745.135.677.953,- dan Rp3.747.125.533.483,-.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.154.781.103,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp685.258.438.697,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp679.103.657.594,-) Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp38.300.353.317,-) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp717.404.010.911,-).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp2.795.897.655.445,- dikurangi Defisit Laporan Operasional (Rp717.404.010.911,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp53.702.430.244,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.614.929.458.705,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.747.125.533.483,-.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	2024		%	CATATAN	2023	
			ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN		B.1				B.1		
1	PNBP	B.1		49.937.226.426	0,00	B.1	0	64.417.035.187
	JUMLAH PENDAPATAN			49.937.226.426	0,00			64.417.035.187
BELANJA		B.2				B.2		
1	Belanja Pegawai	B.3	0	0		B.3	0	0
2	Belanja Barang	B.4	1.299.474.357.000	Rp305.878.752.838	23,50	B.4	2.242.394.797.000	1.964.947.392.478
3	Belanja Modal	B.5	4.417.033.164.000	Rp4.018.908.804.137	90,99	B.5	2.426.764.461.000	2.366.191.442.152
4	Belanja Bantuan Sosial	B.6			0,00	B.6		
	JUMLAH BELANJA		5.716.507.521.000	4.324.787.556.975	75,63		4.669.159.258.000	4.331.138.834.630

Jakarta, 16 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Andi Saguni, MA

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1	5.060.985	1.790.485.942
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.2	14.844.327.350	50.545.625.066
Uang Muka Belanja Modal (prepayment)	C.1.3	111.148.437.683	73.901.791.124
Persediaan	C.1.4	1.604.759.424	40.593.528.026
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	9.267.753.500	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.6	- 46.338.768	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.7	9.221.414.732	-
Jumlah Aset Lancar		136.824.000.174	166.831.430.158
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	75.986.247.258	939.188.803.258
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.037.354.527.009	446.966.628.936
Gedung dan Bangunan	C.2.3	185.212.865.222	120.776.287.377
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	-	88.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5	3.845.551.773.210	2.667.113.714.472
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(351.696.978.225)	(249.813.492.551)
Jumlah Aset Tetap		4.792.408.434.474	3.924.319.941.492
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	14.505.368.647	18.108.602.067
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	562.379.783.140	656.753.356.499
Aset Lain-Lain	C.4.3	886.099.774.712	910.639.521.828
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	(899.956.149.711)	(927.923.886.297)
Jumlah Aset Lainnya		563.028.776.788	657.577.594.097
JUMLAH ASET		5.492.261.211.436	4.748.728.965.747
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	1.745.135.677.953	1.952.831.310.302
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.745.135.677.953	1.952.831.310.302
JUMLAH KEWAJIBAN		1.745.135.677.953	1.952.831.310.302
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	3.747.125.533.483	2.795.897.655.445
JUMLAH EKUITAS		3.747.125.533.483	2.795.897.655.445
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.492.261.211.436	4.748.728.965.747

Jakarta, 16 Mei 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Andi Saguni, MA

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	6.154.781.103	5.370.011.581
JUMLAH PENDAPATAN		6.154.781.103	5.370.011.581
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	
Beban Persediaan	D.3	41.855.318.218	11.161.040.927
Beban Barang dan Jasa	D.4	229.625.072.921	2.128.790.283.183
Beban Pemeliharaan	D.5	6.800.834.030	2.796.002.328
Beban Perjalanan Dinas	D.6	162.940.944.935	136.828.801.893
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	95.450.399.514	870.680.203.085
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	148.539.530.311	74.431.980.247
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	46.338.768	
JUMLAH BEBAN		685.258.438.697	3.224.688.311.663
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(679.103.657.594)	(3.219.318.300.082)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		(73.490.880.292)	(17.502.698.369)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		435.402.000	217.369.877
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		73.926.282.292	17.720.068.246
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.11		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		35.190.526.975	58.819.698.394
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		35.274.155.466	58.819.753.729
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Opr. Lainnya		83.628.491	55.335
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(38.300.353.317)	41.317.000.025
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(38.300.353.317)	41.317.000.025
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(717.404.010.911)	(3.178.001.300.057)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(717.404.010.911)	(3.178.001.300.057)

Jakarta, 16 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Andi Saguni, MA

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1	2.795.897.655.445	2.368.121.232.128
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(717.404.010.911)	(3.178.001.300.057)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	53.702.430.244	(4.714.859.203)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.1	39.454.715.200	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.2		1.819.853
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.3	43.038.262.534	-
LAIN-LAIN	E.4.4	(28.790.547.490)	(4.716.679.056)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	1.614.929.458.705	3.610.492.582.577
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	951.227.878.038	427.776.423.317
EKUITAS AKHIR	E.7	3.747.125.533.483	2.795.897.655.445

Jakarta, 16 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Andi Saguni, MA

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pusat Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan didirikan sebagai salah satu Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 31 Desember 2024 telah disusun dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap ada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.06/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Dilimpahkan Kepada DJKN Kepada Pejabat Dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/489/2014 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Kementerian Kesehatan.

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/KM.06/2017 tentang tentangPenyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada EntitasPemerintah Pusat;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.06/2015 tentangPerubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dankodefikasi Barang Milik Negara;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa PenggunaBarang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan.
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang PedomanAkuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1186);
33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang MasaManfaat dalam rangka Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud padaEntitas Pemerintah Pusat;
34. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Penyampaian Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan T.A 2024 Audited.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5, Kav. 4-9, Jakarta.Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan tujuan di atas, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan;
5. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) modul pelaporan terdiri dari modul GLP (General Ledger dan Pelaporan), modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang. Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset Tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan L2O

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. Harga FIFO, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya. kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena haus. ketinggalan zaman. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang. rusak berat. tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Tabel 2

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	50 tahun
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	10 s.d. 50 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar. aset tetap. dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Tabel 3

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi. Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta Ciptaan Gol I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban***(6) Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Pelayanan Kesehatan memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.718.626.370.000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal yang disebabkan oleh adanya pembangunan Rumah Sakit Vertikal Makassar, pembangunan Rumah Sakit Vertikal Surabaya, pembangunan Rumah Sakit Vertikal Jayapura Papua, pembangunan Rumah Sakit Vertikal IKN, dan penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kupang RSUP dr Ben Mboi serta program Indonesia Health Systems Strengthening Project (Proyek IHSS). Tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan ketersediaan peralatan fungsional di fasilitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Program ini akan dilaksanakan dalam periode 2024-2029.

Rincian Perubahan DIPA TA 2024

Tabel 4 (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan	Rp0	Rp0
Pendapatan PNB	Rp0	Rp0
Jumlah	Rp0	Rp0
Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	Rp0	Rp0
Belanja Barang	Rp565.683.177.000,-	Rp1.301.593.206.000,-
Belanja Modal	Rp4.077.727.385.000,-	Rp4.417.033.164.000,-
Jumlah Belanja	Rp4.643.410.562.000	Rp5.718.626.370.000,-

Realisasi**Pendapatan**

Rp49.937.226.426

,-.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp49.937.226.426,-. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN. Pendapatan yang diperoleh dari penyelesaian ganti kerugian Negara terhadap pegawai. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Tabel 5

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan. pengelolaan BMN	Rp0	Rp435.402.000,-	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	Rp0	Rp623.186,-	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	Rp0	Rp6.154.157.917,-	0
Pendapatan Lain-Lain	Rp0	Rp43.347.043.323,-	0
Jumlah	Rp0	Rp49.937.226.426	

Penjelasan atas rincian tabel diatas sebagai berikut:

Pendapatan dari penjualan. pengelolaan BMN yang terdiri dari:

Pendapatan dari hasil lelang kendaraan roda empat di Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pemerintah.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan

Pendapatan denda atas penyelesaian pekerjaan pemerintah.

Pendapatan lain-lain

- Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp0
- Penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp34.494.785.472,- adalah pendapatan atas pengembalian Klaim COVID 19.
- Penerimaan kembali Belanja Modal TAYL Pengembalian atas belanja modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp8.752.257.851,-.
 1. Penerimaan kembali Pengembalian atas belanja modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp8.747.257.851,- Pengembalian atas kemahalan harga Satuan Kerja In Aktif Tugas Pembantuan RSUD Kuningan, yang disetorkan dengan kode satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan karena satuan kerja yang bersangkutan sudah tidak aktif senilai Rp15.000.000,-.
 2. Pengembalian Kelebihan pembayaran atas biaya langsung personil tenaga ahli pekerjaan jasa konsultasi detail engineering design RS Vertikal Provinsi Papua tahun 2022 senilai 64.020.000,-
 3. Pengembalian Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor BJ.01.01/D.V.9/2251/2023 untuk Pembangunan Bunker RS UPT Vertikal Kupang sebesar Rp.8.099.184.000,-. Pekerjaan Pembangunan Bunker RSUP dr. Ben Mboi Kupang oleh PT. PT. AMARO

SUKSES BERSAMA per 31 Desember 2023 baru menyelesaikan pekerjaan sebesar 56,74%, sehingga untuk pembayaran yang dilakukan kepada penyedia sesuai dengan progres pekerjaan tersebut. Pada saat penampungan dana di RPATA di lakukan secara keseluruhan pada nilai termin yang belum terbayar sehingga terdapat sisa saldo pada rekening penampung RPATA sebesar Rp. 8.099.184.000,- dan untuk nilai tersebut di lakukan penihilan.

4. Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor BJ.01.01/D.V.9/2406/2023 untuk Penambahan Infrastruktur Bangunan RS UPT Vertikal Kupang Rp341.165.355,-. Pekerjaan Infrastruktur Bangunan RS UPT Vertikal Kupang dimana CV Dewi Permai per 31 Desember 2023 baru menyelesaikan pekerjaan sebesar 90%, sehingga untuk pembayaran yang dilakukan kepada penyedia sesuai dengan progres pekerjaan tersebut. Pada saat penampungan dana di RPATA di lakukan secara keseluruhan pada nilai termin yang belum terbayar sehingga terdapat sisa saldo pada rekening penampung RPATA sebesar Rp. 341.165.355,- dan untuk nilai tersebut di lakukan penihilan.
5. Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor BJ.01.01/D.V.9/2301/2023 untuk Pengawasan Bunker RS UPT Vertikal Kupang Rp180.592.896,-. Pekerjaan Pengawasan Bunker RS UPT Vertikal Kupang oleh PT. ELEMEN TIGA TIGA dimana sesuai dengan progres fisiknya per 31 Desember 2023 yaitu sebesar 56,74%, sehingga untuk pembayaran yang dilakukan kepada penyedia sesuai dengan progres pekerjaan tersebut. Pada saat penampungan dana di RPATA di lakukan secara keseluruhan pada nilai termin yang belum

terbayar sehingga terdapat sisa saldo pada rekening penampung RPATA sebesar Rp. 180.592.896,- dan untuk nilai tersebut di lakukan penihilan.

6. Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor BJ.01.01/D.V.9/2365/2023 untuk Pengawasan Pekerjaan Infrastruktur Penunjang Layanan Kupang Rp47.295.600,-. Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Infrastruktur Penunjang Layanan RSUP dr. Ben Mboi Kupang oleh PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA dimana sesuai dengan progres fisiknya per 31 Desember 2023 yaitu sebesar 90%, sehingga untuk pembayaran yang dilakukan kepada penyedia sesuai dengan progres pekerjaan tersebut. Pada saat penampungan dana di RPATA di lakukan secara keseluruhan pada nilai termin yang belum terbayar sehingga terdapat sisa saldo pada rekening penampung RPATA sebesar Rp. 47.295.600,- dan untuk nilai tersebut di lakukan penihilan.

- Penerimaan kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL sebesar Rp100.000.000,-. Pendapatan Yang diperoleh dari pendapatan setoran sisa Saldo JAMKESMAS dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda Bandung.

Rincian Pendapatan lain-lain

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan TA 2024

Tabel 6

No	Akun	Nilai
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	34.494.785.472
3	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	8.752.257.851
4	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	100.000.000
	Jumlah	43.347.043.323

Perbandingan realisasi pendapatan TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut :

Perbandingan realisasi pendapatan
TA 2024 dan 2023
Tabel 7

Uraian	Realisasi	
	2024	2023
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	Rp 435.402.000	Rp 217.369.877
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	Rp 623.186	Rp 106.038.543
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp 6.154.157.917	Rp 5.273.873.038
Pendapatan Lain-Lain	Rp 43.347.043.323	Rp 58.819.753.729
Jumlah	Rp 49.937.226.426	Rp 64.417.037.210

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**

Rp4.324.787.556.975.- Realisasi Belanja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.324.787.556.975.- atau 75,63 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.718.626.370.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran

TA 2024

Tabel 8

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp -	Rp -	-
Belanja Barang	Rp 1.301.593.206.000	Rp 305.878.752.838	23,50
Belanja Modal	Rp 4.417.033.164.000	Rp 4.018.908.804.137	90,99
Total Belanja Kotor	Rp 5.718.626.370.000	Rp 4.324.787.556.975	75,63

Berikut perbandingan Realisasi Belanja:

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023

Tabel 9

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		
	2024	2023	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00%
Belanja Barang	Rp 305.878.752.838	Rp 1.964.947.392.478	-84,43%
Belanja Modal	Rp 4.018.908.804.137	Rp 2.366.191.442.152	69,85%
Total Belanja	Rp 4.324.787.556.975	Rp 4.331.138.834.630	-0,15%

Realisasi Belanja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 0.15 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain menurunnya belanja klaim COVID 19. Belanja Klaim COVID 19 per tanggal 01 Juli 2023 ditanggung oleh BPJS Kesehatan sudah tidak lagi ditanggung oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Belanja Pegawai **B.2.1 Belanja Pegawai**

Rp0

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2024 dan 2023

Tabel 10

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	
Belanja Gaji dan Tunjangan Non	-	-	
Belanja Honorarium	-	-	
Jumlah Belanja Kotor	-	-	
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
Jumlah Belanja	-	-	

Belanja Barang **B.2.2 Belanja Barang**

Rp303.760.109.28

9,-.

Realisasi Belanja Barang Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp305.878.752.838,- dan Rp1.964.947.392.478,-

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan 84,43 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain menurunnya belanja klaim COVID 19. Belanja Klaim COVID 19 per tanggal 01 Juli 2023 ditanggung oleh BPJS Kesehatan sudah tidak lagi ditanggung oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023

Tabel 11

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	24.242.849.578	29.375.586.820	(17,47)
Belanja Barang Non Operasional	37.582.191.944	1.540.318.335.682	(97,56)
Belanja Persediaan	2.866.574.616	1.524.512.287	88,03
Belanja Jasa	71.449.346.735	17.927.580.105	298,54
Belanja Pemeliharaan	6.800.809.030	2.765.734.848	145,90
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	162.394.009.137	137.183.702.623	18,38
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.172.842.497	2.650.900.823	(18,03)
Belanja Barang untuk Bantuan untuk diserahkan ke masyarakat		234.677.178.754	(100,00)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Jasa		1.589.491.029	-
Jumlah Belanja Kotor	307.508.623.537	1.968.013.022.971	(84,37)
Pengembalian Belanja	(1.629.870.699)	(3.065.630.493)	(46,83)
Jumlah Belanja Netto	305.878.752.838	1.964.947.392.478	(84,43)

Belanja Barang **B.2.2.1 Belanja Barang Operasional**

Operasional Belanja barang operasional Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 senilai Rp24.242.849.578,- dan Rp29.370.482.820 turun 17.46 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023.

Belanja barang operasional

TA 2024 dan 2023

Tabel 12

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	13.114.119.588	14.204.365.339	(7,68)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.939.915	35.286.000	(63,33)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1.207.016.050	3.102.494.000	(61,10)
Belanja Barang operasional lainnya	9.908.774.025	11.780.742.263	(15,89)
Belanja Barang Operasional Pandemi COVID 19		252.699.218	(100,00)
Jumlah Belanja Bruto	24.242.849.578	29.375.586.820	(17,47)
Pengembalian	-	5.104.000	
Jumlah Belanja Netto	24.242.849.578	29.370.482.820	(17,46)

Belanja Keperluan **B.2.2.1.1 Belanja Keperluan Perkantoran**

Perkantoran

Rp13.114.119.588

, -

- Belanja Keperluan Perkantoran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp13.114.119.588,- dan Rp14.199.261.339,- Belanja keperluan perkantoran Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan. Pada Kantor pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan belanja keperluan Perkantoran antara lain :
 - Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Januari-Desember 2024.

- Honor pengemudi Bulan Januari-Desember 2024.
- Biaya Outsourcing Satpam
- Biaya Outsourcing Cleaning Services
- Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor
- Penggandaan dan Jilid.
- Jamuan makan pimpinan.
- Konsumsi Rapat.

Belanja

B.2.2.1.2 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp12.939.915,- dan Rp35.286.000,-. Merupakan belanja atas pengiriman surat dinas pos pusat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Belanja Honor

B.2.2.1.3 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

Operasional Satuan Kerja Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.207.016.050,- dan Rp3.102.494.000,- Merupakan belanja atas Honor Operasional Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti: honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, kordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi, honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan

kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.

Belanja Barang B.2.2.1.4 Belanja Barang Operasional lainnya

Operasional Belanja Barang Operasional Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Lainnya Satuan Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah
Kerja sebesar Rp9.908.774.025,- dan Rp11.780.742.263,-. Belanja Barang
Rp9.908.774.025,- Operasional lainnya antara lain belanja Internet RS Makassar,
Pembayaran Belanja Barang Alat Kebersihan RS IKN dan Biaya
Internet Kantor Pusat.

Belanja Barang B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional

Non Operasional Belanja barang non operasional Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Rp37.582.191.944 Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah
4,- sebesar Rp37.582.191.944,- dan Rp1.540.318.335.682 Pelayanan
Kesehatan Rujukan.

Belanja barang Non operasional

TA 2024 dan 2023

Tabel 13

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja bahan	27.161.388.383	24.070.431.491	12,84
Belanja Honor Ouput Kegiatan	3.571.872.750	2.008.564.000	77,83
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.848.930.811	1.514.211.790.191	(99,55)
Belanja peralatan dan mesin-Ekstrakomtabel		27.550.000	
Jumlah Belanja	37.582.191.944	1.540.318.335.682	(97,56)

Belanja Bahan B.2.2.2.1 Belanja Bahan

Rp27.161.388.383 Belanja bahan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
,,- per per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar
Rp27.161.388.383,- dan Rp24.070.431.491 naik 12,52 persen bila
dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Belanja Bahan pada satuan
kerja digunakan untuk mencatatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai)
seperti Konsumsi/bahan makanan, dokumentasi, dan biaya fotokopi
dan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional

seperti sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.

Belanja Honor **B.2.2.2.2 Belanja Honor Output Kegiatan**

Output Kegiatan Belanja honor output kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.571.872.750,- dan Rp2.008.564.000 naik 77,83 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Belanja honor output kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Honor Pejabat Pengadaan.

Belanja Barang **B.2.2.2.3 Belanja Barang Non Operasional Lainnya**

Non Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp6.848.211.930.811,- dan Rp1.514.211.790.191.811,- turun 99.55 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. . Hal ini disebabkan adanya penurunan pembayaran Klaim Covid 19 oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan karena semenjak ditetapkan kasus COVID 19 dari pandemi menjadi menjadi endemi per tanggal 31 Agustus Tahun 2023 maka menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Permenkes Nomor 23 Tahun 2023 di Pasal 9 ayat 2 Setelah berlakunya Keputusan Perpres 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Indonesia, rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mulai dirawat pada paling lambat tanggal 31 Agustus 2023 dapat mengajukan klaim penggantian biaya kepada BPJS Kesehatan. Sehingga pengajuan klaim penggantian biaya perawatan COVID 19 tidak lagi ke Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan namun ke BPJS Kesehatan.

Belanja

B.2.2.2.5 Belanja Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin

Ekstrakoom

Belanja Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp27.550.000.

perralatan dan mesin Rp0,-

Belanja

B.2.2.3 Belanja Persediaan

persediaan

Belanja persediaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.866.574.616,- dan Rp1.524.512.287 naik 88,03 persen dari Belanja Persedian Tahun Anggaran. Belanja persediaan konsumsi adalah belanja persediaan untuk menunjang kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Rp2.866.574.616,-

Belanja barang persediaan
2024 dan 2023

Tabel 14

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	%
Belanja barang persediaan konsumsi	2.866.574.616	1.524.512.287	88,03
Jumlah Belanja Barang Persediaan	2.866.574.616	1.524.512.287	88,03

Belanja

Jasa

B.2.2.4 Belanja Jasa

*Rp71.445.382.735
,-*

Belanja Jasa Kantor Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp71.445.382.735,- dan Rp23.650.121.451 naik 202.09 % bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Belanja Jasa
TA 2024 dan 2023
Tabel 15

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Langganan Listrik	907.701.824	2.111.423.600	(57,01)
Belanja Langganan Telepon	28.899.916	25.344.519	14,03
Belanja Jasa langganan Air	68.499.200	-	
Belanja Jasa Pos dan Giro	4.170.000	4.230.000	(1,42)
Belanja Jasa Konsultan	28.914.670.072	4.677.672.329	518,14
Belanja Sewa	2.974.903.784	2.272.974.536	30,88
Belanja Jasa Profesi	14.063.131.474	6.253.270.000	124,89
Belanja Jasa Lainnya	24.487.370.465	2.582.665.121	848,14
Jumlah Belanja Bruto	71.449.346.735	17.927.580.105	298,54
Pengembalian Belanja	(3.964.000)	(42.900.000)	-
Jumlah Belanja	71.445.382.735	23.650.121.451	202,09

Belanja langganan

listrik

Rp907.701.824,-

B.2.2.4.1 Belanja Langganan Listrik

Belanja langganan listrik Kantor Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp907.701.824,- dan Rp2.111.423.600 turun Rp57.01 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal tersebut disebabkan karena Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan tidak lagi membayar tagihan RS Vertikal Kementerian Kesehatan RSUP dr Mben Mboi Kupang, dikarenakan RS tersebut telah memiliki DIPA masing-masing untuk membayar tagihan tersebut.

Belanja langganan

telepon

Rp28.889.916,-

B.2.2.4.2 Belanja Langganan Telepon

Belanja langganan telepon Kantor Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 Rp28.889.916,- dan Rp25.344.519 naik 14,03 % bila dibandingkan dengan Belanja Langganan Telepon Kantor Pusat Ditjen Yankes per 31 Desember 2023

Belanja langganan

telepon

Rp68.499.200,-

B.2.2.4.2 Belanja Langganan Air

Belanja langganan air Kantor Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 Rp68.499.200,- dan Rp0,-. Merupakan Langganan PDAM RS Vertikal Makassar.

Belanja Jasa Pos dan Giro **B.2.2.4.3 Belanja Jasa Pos dan Giro**

Rp4.170.000,- Belanja Jasa Pos dan Giro Kantor Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023 Rp4.170.000,- dan Rp4.230.000,- turun 1.42 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal tersebut disebabkan efisiensi di segala lini termasuk belanja jasa pos dan giro.

Belanja Jasa Konsultan **B.2.2.4.4 Belanja Jasa Konsultan**

Rp28.914.670.072,- Belanja Jasa Konsultan Kantor Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp28.914.670.072 dan 4.677.672.329 naik 518,14 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Antara lain adalah:

1. Belanja Jasa Konsultan Equipment Consultant for The Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units IsDB IDN 1031.
2. Belanja Jasa Konsultan Fasilitas Pengelolaan Proyek Penguatan RS Layanan KJSU (SIHREN)
3. Belanja Jasa Konsultan Klaim TUP Jasa Konsultansi : Penyusunan Pedoman SMART HOSPITAL.

Belanja Sewa **B.2.2.4.5 Belanja Sewa**

Rp2.973.039.784,- Belanja Sewa Kantor Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.973.039.784,- dan Rp2.272.974.536,- naik 848,88 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Belanja sewa 2024 antara lain adalah :

1. Belanja sewa Gedung, dan Kendaraan dalam acara Sosialisasi dan advokasi pada masyarakat mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan penyakit infeksius dan KJSU.
2. Belanja sewa Gedung dan Kendaraan dalam acara Pembinaan, sosialisasi dan advokasi pada masyarakat mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan penyakit infeksius dan KJSU.

3. Belanja sewa Gedung dan Kendaraan dalam acara Advokasi dan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Primer.
4. Belanja sewa gedung Kampanye dan Advokasi dalam acara Keselamatan Pasien di Fasyankes, Organisasi Profesi, Asosiasi Pendidikan dan masyarakat melalui berbagai forum dan media informasi

Belanja *Jasa* **B.2.2.4.6 Belanja Jasa Profesi**

Profesi *Rp* Belanja Jasa Profesi Kantor Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp14.063.131.474,- dan Rp6.210.370.000 naik 124.89 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawainegeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lain/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu

Belanja *Jasa* **B.2.2.4.7 Belanja Jasa Lainnya**

Lainnya *Rp* Belanja Jasa Lainnya Kantor Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp24.487.370.465,- dan Rp 2.582.665.121,-. Belanja Jasa Lainnya naik 848,14 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Belanja jasa lainnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan antara lain digunakan untuk:

- Biaya Event Organizer (EO) Kegiatan Indonesia International Cancer Conference.
- Belanja atas penataan arsip di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- Biaya event organizer pada acara Penguatan Budaya Kerja di lingkungan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan.
- Biaya Penataan Arsip Ruang 401 dan 415 Lantai 4 Gedung Adyatma.

Belanja**B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan****Pemeliharaan**

Rp6.800.809.030,-

Belanja Pemeliharaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 Rp6.800.809.030,- dan Rp2.915.110.524 naik 145.90 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023..

Belanja pemeliharaan adalah belanja atas pemeliharaan peralatan mesin dan peralatan mesin lainnya di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Belanja Pemeliharaan

TA 2024 dan 2023

Tabel 16

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	4.026.384.678	-	
Belanja barang pemeliharaan peralatan dan mesin	2.457.430.602	2.742.309.348	(10,39)
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	299.955.650	-	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.038.100	23.425.500	(27,27)
Jumlah Belanja Barang Pemeliharaan	6.800.809.030	2.765.734.848	145,90

Belanja**B.2.2.5.1 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan****Pemeliharaan**

Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp4.026.384.678,- dan Rp0,-.

Belanja**B.2.2.5.2 Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin****Pemeliharaan**

Peralatan dan Mesin

Rp2.457.430.602,-.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.457.430.602,- dan Rp2.742.309.348,-. Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.

Belanja Bahan Bakar B.2.2.5.3 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp299.955.650,- dan Rp299.955.650,- dan Rp0,- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas pada satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berupa pembelian Bahan Bakar Minyak untuk RS UPT Vertikal Propinsi Papua.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya B.2.2.5.4 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp17.038.100,- dan Rp0,- dan Rp17.038.100,- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan Mesin fotokopi, Note book dan AC Split.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 Rp160.768.102.438,- dan Rp134.663.964.176. meningkat 19.38%.

8,-.

Belanja Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023
Tabel 17

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 202	NAIK (TURUN) %
Belanja perjalanan biasa	91.736.146.677	72.875.496.826	25,88
Belanja perjalanan dinas dalam kota	999.384.000	1.015.979.800	(1,63)
Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	20.920.375.391	16.339.961.496	28,03
Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	48.738.103.069	46.952.264.501	3,80
Jumlah Belanja Bruto	162.394.009.137	137.183.702.623	18,38
Pengembalian	(1.625.906.699)	(3.010.598.952)	
Jumlah Belanja Netto	160.768.102.438	134.663.964.176	19,38

Belanja Perjalanan B.2.2.7 Belanja Perjalanan Dinas luar Negeri

Dinas Luar Negeri Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 Rp2.172.842.497,- dan Rp2.643.873.282 turun 17.92 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini terkait dengan efisiensi belanja perjalanan dinas luar negeri.

Belanja perjalanan dinas luar negeri
TA 2024 dan 2023
Tabel 18

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Perjalanan Biasa	2.172.842.497	1.780.891.601	22,01
Belanja Perjalanan lainnya		870.009.222	(100,00)
Jumlah Belanja	2.172.842.497	2.650.900.823	(18,03)
Pengembalian		7.027.541	
Jumlah Belanja	2.172.842.497	2.643.873.282	(17,82)

Belanja peralatan B.2.2.8 Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan ke mesin untuk Masyarakat/Pemda

diserahkan ke Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Masyarakat/Pemda per 31 Desember 2024 dan 2023 Rp0,- dan Rp234.677.178.754.

/Pemda R,-p0 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Masyarakat/Pemda
TA 2024 dan 2023

Tabel 19

(dalam rupiah)

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Masyarakat/Pemda		234.677.178.754
Jumlah Belanja	-	234.677.178.754

B.2.2.9 Belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah

Belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah per 31 Desember 2024 dan 2023 Rp0,- dan . Rp1.589.491.029,-.

Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Masyarakat/Pemda
TA 2024 dan 2023
Tabel 20
(dalam rupiah)

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Belanja Barang untuk Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah dalam bentuk jasa		1.589.491.029
Jumlah Belanja	-	1.589.491.029

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.018.908.804.137,- dan Rp2.366.191.442.152 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal
TA 2024 dan 2023
Tabel 21

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.167.533.093.865,	414.719.015.254	(182)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.818.398.882.265	1.951.227.176.898	(44)
Belanja Modal Lainnya	32.976.828.007,	245.250.000	(13.346)
Jumlah Belanja	4.018.908.804.137	2.366.191.442.152	(70)

Belanja Modal B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Belanja modal Peralatan dan Mesin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 1.167.533.093.865,-. Dan Rp414.719.015.254,-

1.167.533.093.86

Rincian belanja modal peralatan dan mesin

5,-.

TA 2024 dan 2023

Tabel 22

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.167.533.093.865	414.719.015.254	181,52
Jumlah Belanja	1.167.533.093.865	414.719.015.254	181,52

Belanja Modal peralatan dan mesin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan naik 181.52 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Belanja modal peralatan dan mesin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan digunakan untuk antara lain:

1. Pengadaan Mebelair dan Peralatan Elektronik Perkantoran Untuk RS Vertikal Papua.
2. Pengadaan Pemenuhan Alat Kesehatan RS UPT Vertikal Kupang.
3. Pengadaan Pemenuhan Alat Kesehatan RS UPT Vertikal RS UPT Vertikal Papua.
4. Pengadaan Alat kesehatan dan non alkes dan Meubeler RS UPT Vertikal Surabaya.
5. Pengadaan Alat kesehatan dan non alkes Meubeler RS UPT Vertikal Makassar.
6. Pengadaan Alat kesehatan dan non alkes Meubeler RS UPT Vertikal IKN.
7. Pengadaan Alat kesehatan dan non alkes Meubeler RS UPT Vertikal IKN.
8. Pengadaan Mebelair dan Peralatan Elektronik Perkantoran Kantor Pusat.
9. Pengadaan alat pengolah data Perkantoran PMU SIHREN.
10. Pengadaan Alat Pengolah Data pada Hospital management development Expert for President Director RSV Makassar

Belanja Modal B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Belanja modal Gedung dan Bangunan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.818.398.882.265,- dan Rp1.951.227.176.898,- Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat dari tabel berikut:

Rincian belanja modal Gedung dan Bangunan
Kantor pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
TA 2024 dan 2023

Tabel 23

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.785.022.492.904	1.912.383.374.310	46
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	33.376.389.361	38.843.802.588	(14)
Jumlah Belanja	2.818.398.882.265	1.912.383.374.310	47

Belanja modal Gedung dan bangunan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.785.022.492.904,- dan Belanja Modal perencanaan dan pengawasan Gedung sebesar Rp33.376.389.361,-.

Rincian belanja modal Gedung dan bangunan TA 2024

Tabel 24

Rincian Realisasi		
RAB.001 : Pengembangan fasilitas rujukan Kawasan Indonesia Timur		
No	Uraian Belanja	Nilai
1	Termin 3 Konstruksi RS UPT Vertikal Papua	Rp 66.107.003.413
2	Termin 4 Konstruksi RS UPT Vertikal Papua	Rp 48.968.150.677
3	Termin 5 Konstruksi RS UPT Vertikal Papua	Rp 49.022.863.054
4	Termin 6 Konstruksi RS UPT Vertikal Papua	Rp 54.421.214.614
5	Pembayaran 100% (Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2023) Termin 4 Penambahan Infrastruktur Bangunan RSUP dr. Ben Mboi Kupang	Rp 341.165.355
6	Pembayaran 100% (Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2023) Termin 3 Pembangunan Bunker RSUP dr. Ben Mboi Kupang	Rp 8.099.184.000
7	Termin 7 Konstruksi RS UPT Vertikal Papua	Rp 54.421.214.614
8	Uang Muka Sitostatika Kemoterapi RS dr. J Leimena Ambon	Rp 294.594.594
9	Termin 8 Konstruksi RS UPT Vertikal Papua	Rp 54.421.214.614
10	Termin 9 Konstruksi RS UPT Vertikal Papua	Rp 54.421.214.614
11	Uang Muka Penambahan Infrastruktur Landscape RSUP dr. Ben Mboi Kupang Tahap 2	Rp 2.781.015.773
12	Termin 1 Sitostatika Kemoterapi RS dr. J Leimena Ambon	Rp 883.783.783
13	Pembayaran 100% Pasang Baru Sambungan Listrik RS Vertikal Jayapura	Rp 3.460.624.032
14	Termin 2 Sitostatika Kemoterapi RS dr. J Leimena Ambon	Rp 294.594.595
15	Termin 1 Penambahan Infrastruktur Landscape RSUP dr. Ben Mboi Kupang Tahap 2	Rp 1.946.711.041
16	Uang Muka Pembukaan Jalan Akses Jalur 40 RSUP dr. Ben Mboi Kupang	Rp 1.197.815.346
17	Termin 2 Penambahan Infrastruktur Landscape RSUP dr. Ben Mboi Kupang Tahap 2	Rp 2.221.753.500
18	Termin 10 (100%) Konstruksi RS UPT Vertikal Papua	Rp 84.365.071.529
19	Termin 3 Penambahan Infrastruktur Landscape RSUP dr. Ben Mboi Kupang Tahap 2	Rp 3.237.380.462
20	Termin 1 Pembukaan Jalan Akses Jalur 40 RSUP dr. Ben Mboi Kupang	Rp 2.794.902.474
TOTAL		Rp 493.701.472.084

RBV.001 : Pembangunan dan Pengembangan RSUPT Riau (LR-12)			
No	Uraian Belanja	Nilai	
1	Uang Muka Jasa Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan, Perencanaan Konstruksi Bangunan dan AMDAL-Pertek-ANDALALIN RS UPT Vertikal Riau	Rp	1.941.358.365
2	Termin 1 Jasa Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan, Perencanaan Konstruksi Bangunan dan AMDAL-Pertek-ANDALALIN RS UPT Vertikal Riau	Rp	825.077.305
3	Termin 2 Jasa Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan, Perencanaan Konstruksi Bangunan dan AMDAL-Pertek-ANDALALIN RS UPT Vertikal Riau	Rp	825.077.305
4	Termin 3 Jasa Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan, Perencanaan Konstruksi Bangunan dan AMDAL-Pertek-ANDALALIN RS UPT Vertikal Riau	Rp	2.887.770.568
5	Termin 4 Jasa Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan, Perencanaan Konstruksi Bangunan dan AMDAL-Pertek-ANDALALIN RS UPT Vertikal Riau	Rp	2.062.693.263
6	Termin 5 Jasa Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan, Perencanaan Konstruksi Bangunan dan AMDAL-Pertek-ANDALALIN RS UPT Vertikal Riau	Rp	1.650.154.610
7	Termin 6 Jasa Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan, Perencanaan Konstruksi Bangunan dan AMDAL-Pertek-ANDALALIN RS UPT Vertikal Riau	Rp	1.100.103.073
8	Uang Muka Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Riau	Rp	1.169.020.076
9	Termin 7 Jasa Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan, Perencanaan Konstruksi Bangunan dan AMDAL-Pertek-ANDALALIN RS UPT Vertikal Riau	Rp	412.538.653
10	Termin 1 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Riau	Rp	1.052.118.069
11	Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Fisik dan Bangunan Pembangunan RS UPT Vertikal Riau"	Rp	99.486.490.500
12	PHTC Soil test	Rp	1.556.222.600
TOTAL		Rp	114.968.624.387

RAB.007 : Pembangunan dan Pengembangan RS IKN (LR)			
No	Nama Suplier	Uraian Belanja	Nilai
1	ADHI - HK KSO	Termin 1 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS IKN	Rp 21.564.370.526
2	ADHI - HK KSO	Termin 2 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS IKN	Rp 43.128.741.053
3	ADHI - HK KSO	Termin 3 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS IKN	Rp 43.128.741.053
4	ADHI - HK KSO	Termin 4 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS IKN	Rp 64.693.111.579
5	ADHI - HK KSO	Termin 5 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS IKN	Rp 69.025.622.924
6	ADHI - HK KSO	Termin 6 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS IKN	Rp 69.025.622.924
7	ADHI - HK KSO	Termin 7 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS IKN	Rp 45.457.713.314
8	ADHI - HK KSO	Uang Muka Konstruksi Fisik dan Bangunan Lanjutan RS IKN	Rp 40.473.060.000
9	ADHI - HK KSO	Termin 8 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS IKN	Rp 45.457.713.314
10	ADHI - HK KSO	Termin 1 Konstruksi Fisik dan Bangunan Lanjutan RS IKN	Rp 45.869.468.000
11	ADHI - HK KSO	Termin 2 Konstruksi Fisik dan Bangunan Lanjutan RS IKN	Rp 45.869.468.000
12	ADHI - HK KSO	Termin 3 Konstruksi Fisik dan Bangunan Lanjutan RS IKN	Rp 71.648.409.355
13	ADHI - HK KSO	Pembayaran Termin 9 Pekerjaan Konstruksi Fisik dan Bangunan Pembangunan Rumah Sakit Ibu Kota Nusantara (Pembangunan dan Pengembangan RS IKN)	Rp 45.457.713.313
14	ADHI-HK KSO	Termin 4 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan RS UPT IKN (Pembangunan dan Pengembangan RS IKN)	Rp 93.232.896.645
15	GRATIA JAYA MULYA	Pengadaan MOT RS UPT Vertikal IKN	Rp 5.661.050.000
TOTAL			Rp 749.693.702.000

RAB.004 : Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Surabaya		
No	Uraian Belanja	Nilai
1	Termin 12 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 90.742.868.083
2	Termin 13 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 64.198.339.769
3	Termin 14 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 52.036.472.318
4	Termin 15 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 19.327.946.491
5	Termin 16 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 54.295.807.327
6	Termin 17 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 87.295.388.663
7	Termin 18 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 67.663.613.153
8	Uang Muka Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 7.022.314.900
9	Uang Muka Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 6.032.475.330
10	Termin 19 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 32.744.332.123
11	Termin 20 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 20.845.643.684
12	Uang Muka Pagar Keliling RS Surabaya	Rp 682.817.900
13	Termin 21 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 19.296.683.590
14	Termin 1 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 7.238.970.396
15	Uang Muka Loose Furniture RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 937.703.080
16	Termin 1 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 8.426.777.880
17	Termin 1 Pagar Keliling RS Surabaya	Rp 682.817.900
18	Termin 1 Pengadaan Hub Switch RSUP Surabaya	Rp 1.320.697.980
19	Termin 2 Pengadaan Hub Switch RSUP Surabaya	Rp 906.448.200
20	Termin 3 Pengadaan Hub Switch RSUP Surabaya	Rp 1.325.200.695
21	Termin 22 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 24.864.778.349
22	Termin 23 (Jaminan Retensi) Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT	Rp 82.048.293.450
23	Termin 2 Pagar Keliling RS Surabaya	Rp 682.817.900
24	Pembayaran 100% Pengadaan IP TV (STB) - RSUP Vertikal Surabaya	Rp 322.000.000
25	Pembayaran 100% Pengadaan Wifi RS Surabaya	Rp 950.972.232
26	Termin 1 Loose Furniture RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 1.125.243.696
27	Termin 2 Loose Furniture RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 1.312.784.312
28	Termin 2 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 8.445.465.462
29	Pembayaran 100% Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Surab	Rp 1.373.680.500
30	Termin 1 Pengadaan Server Storage - RSUP Vertikal Surabaya	Rp 3.002.948.964
31	Termin 2 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 9.831.240.860
32	Termin 3 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 8.445.465.462
33	Termin 3 Loose Furniture RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 1.312.784.312
34	Termin 2 Pengadaan Server Storage - RSUP Vertikal Surabaya	Rp 1.286.978.127
35	Termin 4 Pengadaan Hub Switch RSUP Surabaya	Rp 1.522.434.375
36	Termin 3 Pagar Keliling RS Surabaya	Rp 682.817.900
37	Termin 3 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 9.831.240.860
38	Pembayaran 100% Pengadaan Loose Furniture (Meja) RS UPT Vertikal	Rp 354.530.000
39	Pembayaran 100% CCTV - RSUP Vertikal Surabaya	Rp 1.121.600.000
40	Termin 4 Pagar Keliling RS Surabaya	Rp 682.817.909
41	Pembayaran 100% Belanja Modal MOT RS Surabaya	Rp 36.000.000.000
42	Pembayaran 100% Belanja Modal Kabel Data ICT RS Surabaya	Rp 213.617.400
43	Izin konstruksi fasilitas kedokteran nuklir diagnostik in Vivo	Rp 30.680.000
44	Izin konstruksi fasilitas kedokteran nuklir terapi	Rp 26.845.000
45	Pembayaran Belanja Modal Retensi MK Surabaya	Rp 888.130.522
46	Izin Konstruksi Radioterapi	Rp 3.405.000
47	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (Direktorat Fasilitas	Rp 174.716.772
48	Pertanggungjawaban TUP (Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	Rp 507.246.000
TOTAL		Rp 740.068.854.826

RAB.005 : Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Makassar		
No	Uraian Belanja	Nilai
1	Termin 8 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar	Rp 41.719.483.111
2	Termin 9 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar	Rp 23.331.326.983
3	Termin 10 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar	Rp 8.417.980.569
4	Termin 11 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar	Rp 59.653.385.655
5	Termin 12 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar	Rp 74.566.732.069
6	Termin 13 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar	Rp 89.480.078.483
7	Termin 14 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar	Rp 59.653.385.655
8	Pekerjaan Penyambungan Baru Daya Listrik RS UPT Kemenkes Makassar	Rp 2.703.130.000
9	Termin 15 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar	Rp 44.837.238.601
10	Pembayaran 100 % Paket Pengadaan Karet Rumput Sintetis RS UPT Vertikal Makassar	Rp 975.800.000
11	Uang Muka Loose Furniture (Paket 3) Rs Makassar	Rp 509.451.980
12	Termin 16 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar	Rp 14.914.348.469
13	Pembayaran 100% Pengadaan MOT Ruang OK RS UPT Vertikal Makassar	Rp 72.000.000.000
14	Pembayaran 100% Pengadaan MOT Ruang Cathlab OK RS UPT Vertikal Makassar	Rp 2.890.000.000
15	Pembayaran 100% Paket Pekerjaan Pemasangan Timbal RS UPT Vertikal Makassar	Rp 1.220.611.500
16	Termin 17 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar	Rp 14.914.348.469
17	Pembayaran 100% Paket Pekerjaan Pengadaan Signage RS UPT Vertikal Makassar	Rp 958.632.420
18	Termin 18 Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar	Rp 14.356.382.612
19	Pembayaran 100% Loose Furniture (Paket 3) Rs Makassar	Rp 2.037.807.920
20	Pembayaran 100% Paket Pengadaan Instalasi Kitchen Set Gedung RSUP	Rp 1.506.235.500
21	Termin 19 (Retensi) Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar	Rp 78.496.570.892
22	Pembayaran 100% Pekerjaan Prainstansi Alat Radiasi dan Zat Radioaktif	Rp 13.930.219.369
23	Pembayaran 100% Pengadaan Alat Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan	Rp 5.780.000.000
24	Uang Muka Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Makassar	Rp 3.623.305.160
25	Uang Muka Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Makassar	Rp 6.833.801.200
26	Termin 1 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Makassar	Rp 4.347.966.192
27	Termin 1 Pengadaan Loose Furniture (Paket 4) RS Makassar	Rp 1.505.253.240
28	Termin 1 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Makassar	Rp 8.200.561.440
29	Termin 2 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Makassar	Rp 5.072.627.224
30	Termin 2 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Makassar	Rp 9.567.321.680
31	Termin 2 Pengadaan Loose Furniture (Paket 4) RS Makassar	Rp 1.505.253.240
32	Termin 3 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Makassar	Rp 5.072.627.224
33	Termin 3 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Makassar	Rp 9.567.321.680
34	Termin 1 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Makassar (Paket 5)	Rp 101.040.525
35	Termin 2 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Makassar (Paket 5)	Rp 101.040.525
36	Termin 3 Pengadaan Loose Furniture (Paket 4) RS Makassar	Rp 2.007.004.320
37	Termin 3 Pengadaan Loose Furniture RS UPT Vertikal Makassar (Paket 5)	Rp 134.720.700
38	Pembayaran Belanja Modal Retensi MK RS Makassar	Rp 70.000.000
39	Izin Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	Rp 26.845.000
TOTAL		Rp 686.589.839.607

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung

Belanja modal Gedung dan Bangunan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp33.376.389.361,- dan Rp1.912.383.374.310,- Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat dari tabel berikut:

Rincian belanja modal Gedung dan Bangunan
Kantor pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
TA 2024
Tabel 25

(dalam Rupiah)

Rincian Realisasi			
RAB.001 : Pengembangan fasilitas rujukan Kawasan Indonesia Timur			
No	Nama Suplier	Uraian Belanja	Nilai
1	PT.CIRIAJASA CIPTA MANDIRI KSO PT. PANGRIPTA WANUA KONSULINDO	Termin 3 Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit UPT Vertikal Papua	Rp 962.758.225
2	PT.CIRIAJASA CIPTA MANDIRI KSO PT. PANGRIPTA WANUA KONSULINDO	Termin 4 Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit UPT Vertikal Papua	Rp 677.998.750
3	PT.CIRIAJASA CIPTA MANDIRI KSO PT. PANGRIPTA WANUA KONSULINDO	Termin 5 Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit UPT Vertikal Papua	Rp 677.998.750
4	PT. ELEMEN TIGA TIGA	Pembayaran 100% (Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2023) Termin 3 Pengawasan Bunker RS UPT Vertikal Kupang	Rp 180.592.896
5	PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	Pembayaran 100% (Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2023) Termin 5 Pengawasan Pekerjaan Infrastruktur Penunjang Layanan RSUP dr. Ben Mboi Kupang	Rp 47.295.600
6	PT.CIRIAJASA CIPTA MANDIRI KSO PT. PANGRIPTA WANUA KONSULINDO	Termin 6 Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit UPT Vertikal Papua	Rp 677.998.750
7	PT.CIRIAJASA CIPTA MANDIRI KSO PT. PANGRIPTA WANUA KONSULINDO	Termin 7 Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit UPT Vertikal Papua	Rp 677.998.750
8	PT.CIRIAJASA CIPTA MANDIRI KSO PT. PANGRIPTA WANUA KONSULINDO	Termin 8 Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit UPT Vertikal Papua	Rp 677.998.750
9	PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	Pembayaran 100% Pengawasan Pekerjaan Infrastruktur Penunjang Layanan RSUP Kupang	Rp 99.548.400
10	KSO PT Pandu Persada - PT Hasta Teknik Konsultan	Pembayaran Termin 7 Konsultan Perencana RS Papua	Rp 1.305.985.789
11	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI KSO PT. PANGRIPTA WANUA KONSULINDO	Termin 9 Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit UPT Vertikal Papua	Rp 1.491.597.250
12	PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	Pembayaran 100% Pengawasan Pekerjaan Infrastruktur Penunjang Layanan RSUP Kupang	Rp 300.356.000
TOTAL			Rp 7.778.127.910

RAB.004 : Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Surabaya			
No	Nama Suplier	Uraian Belanja	Nilai
1	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 13 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 954.486.070
2	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 14 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 681.775.764
3	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 15 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 477.243.035
4	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 16 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 204.532.729
5	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 17 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 545.420.611
6	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 18 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 954.486.070
7	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 19 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 749.953.340
8	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 20 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 272.710.306
9	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 21 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 204.532.729
10	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 22 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 204.532.729
11	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 23 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Surabaya	Rp 204.532.729
12	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 24 (Jaminan Retensi) Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT V	Rp 816.308.888
13	PATROON - PANDU, KSO	Termin VII Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan, dan Pere	Rp 933.678.985
TOTAL			Rp 7.204.193.985
RAB.005 : Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Makassar			
No	Nama Suplier	Uraian Belanja	Nilai
1	PT. VIRAMA KARYA (Persero) Jo CIRIAJASA E.C	Termin 7 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Makassar	Rp 1.681.690.000
2	PT. VIRAMA KARYA (Persero) Jo CIRIAJASA E.C	Termin 8 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Makassar	Rp 1.681.690.000
3	KSO PENTA - PATROON - INDAH	Pembayaran Termin 7 Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Kelayakan, Master Pl	Rp 1.001.936.250
4	PT. VIRAMA KARYA (Persero) Jo CIRIAJASA E.C	Termin 9 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Makassar	Rp 1.681.690.000
5	PT. VIRAMA KARYA (Persero) Jo CIRIAJASA E.C	Termin 10 (Retensi) Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi RS UPT Vertikal Ma	Rp 1.611.690.000
TOTAL			Rp 7.658.696.250
RAB.007 : Pembangunan dan Pengembangan RS IKN (LR)			
No	Nama Suplier	Uraian Belanja	Nilai
1	PT. PENTA REKAYASA	Termin 6 Jasa Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan dan Perencanaan Konstruksi Bangunan RS UPT Vertikal IKN	Rp 1.212.167.569
2	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 2 Jasa Konsultasi Manjemen Konstruksi Pembangunan dan Pengembangan RS IKN	Rp 220.436.936
3	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 3 Jasa Konsultasi Manjemen Konstruksi Pembangunan dan Pengembangan RS IKN	Rp 220.436.936
4	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 4 Jasa Konsultasi Manjemen Konstruksi Pembangunan dan Pengembangan RS IKN	Rp 220.436.936
5	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 5 Jasa Konsultasi Manjemen Konstruksi Pembangunan dan Pengembangan RS IKN	Rp 220.436.936
6	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 6 Jasa Konsultasi Manjemen Konstruksi Pembangunan dan Pengembangan RS IKN	Rp 869.597.675
7	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 7 Jasa Konsultasi Manjemen Konstruksi Pembangunan dan Pengembangan RS IKN	Rp 869.597.675
8	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 8 Jasa Konsultasi Manjemen Konstruksi Pembangunan dan Pengembangan RS IKN	Rp 869.597.675
9	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 9 Jasa Konsultasi Manjemen Konstruksi Pembangunan dan Pengembangan RS IKN	Rp 869.597.675
10	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 10 Jasa Konsultasi Manjemen Konstruksi Pembangunan dan Pengembangan RS IKN	Rp 545.017.305
11	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Termin 11 Jasa Konsultasi Manjemen Konstruksi Pembangunan dan Pengembangan RS IKN	Rp 180.699.120
12	PT. PENTA REKAYASA	Termin 7 Jasa Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan dan Perencanaan Konstruksi Bangunan RS UPT Vertikal IKN	Rp 909.125.677
13	PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	Pembayaran Belanja Modal Penyambungan Daya Baru Listrik RS IKN	Rp 1.698.230.000
14		Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan) untuk Keperluan Belanja Modal sebesar 99.626.000,00	Rp 99.626.000
15	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Ibu Kota Nusantara (IKN)	Rp 1.730.367.101
TOTAL			Rp 10.735.371.216

Belanja Modal **B.2.3.3 Belanja Modal lainnya**

lainnya Belanja modal lainnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 32.976.828.007,- dan Rp245.250.000,- naik 13.446 persen

dibandingkan 31 Desember 2023..

Belanja modal lainnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berupa renovasi lantai 4 dan 5 gedung Kantor Pusat Ditjen Yankes. Gedung tersebut terletak di Jalan Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Gedung Adyatma Lantai 4 dan Lantai 5.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp136.824.000.174

,-

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 136.824.000.174 , - dan 166.831.430.158,-

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas Lainnya dan

Setara Kas

Rp5.060.985,-

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5.060.985,- dan Rp1.790.485.942,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Rincian Kas dan Setara Kas pada satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran

TA 2024 dan 2023

Tabel 26

(dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	4.408.285		
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	652.700	1.790.485.942	(99,96)
	5.060.985	1.790.485.942	(99,72)

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp4.408.285,- dan Rp0,-. Rincian kas lainnya di Bendahara Pengeluaran Kas pada satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah pengembalian honor.

Kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

Kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp652.700,- dan Rp1.790.485.942,-

Rincian Kas Lainnya dari Hibah

TA 2024 dan 2023

Tabel 27

(dalam rupiah)

Keterangan	TA 2024
Dana Hibah WHO Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan	Rp652.700,00
Jumlah	Rp652.700,00

Belanja Dibayar di Muka
Rp14.844.327.350,-

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp Rp14.844.327.350,- dan Rp50.545.625.066,-. Belanja dibayar dimuka Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan merupakan hasil perhitungan kelebihan bayar klaim Covid 19 berdasarkan reviu BPKP dan data PPK Klaim covid 19 yang telah di rekonsiliasi dengan RS terkait dan menyatakan masih tidak setuju;

Uang Muka Belanja Modal (prepayment)
Rp111.148.437.683,-

C.1.3. Uang Muka Belanja Modal (prepayment)

Uang muka belanja modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp111.148.437.683,- dan Rp73.901.791.124

Uang muka belanja modal merupakan hasil koreksi pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk pembangunan Rumah Sakit Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Ben Mboi Kupang Nusa Tenggara Timur. Rincian atas uang muka belanja modal, dapat ditampilkan sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja Modal

TA 2024

Tabel 28

No	Keterangan	TA 2024
1	Pembangunan RS Vertikal	Rp 66.472.322,57
2	Pembangunan RS Vertikal IKN	Rp 10.049.460.798,00
3	Pembangunan RS Vertikal IKN	Rp 284.446.961,78
4	Pembangunan RS Vertikal Riau	Rp 99.477.536.715,86
5	Pembangunan RS Vertikal Riau	Rp 1.052.118.068,76
6	Pembangunan RS Vertikal Riau	Rp 218.402.816,06
	Total	Rp 111.148.437.683,02

Piutang Bukan

Pajak

Rp9.267.753.500,--

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp9.267.753.500,- dan Rp0,- . Piutang bukan pajak merupakan hasil perhitungan kelebihan bayar klaim Covid 19 berdasarkan reuiu BPKP dan data PPK Klaim covid 19 yang telah di rekonsiliasi dengan RS terkait dan menyatakan setuju;

Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih –

Piutang Bukan

Pajak

(Rp46.338.768,-)

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp46.338.768,-) dan Rp0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah Penyisihan piutang kelebihan bayar klaim Covid 19 dengan kualitas lancar.

Persediaan

Rp1.604.759.424,-

C.1.4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.604.759.424,- dan Rp40.593.528.026 Rincian

persediaan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Persediaan

TA 2024 dan 2023

Tabel 29

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	1.604.759.424	40.593.528.026
Jumlah	1.604.759.424	40.593.528.026

Semua jenis persediaan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp4.792.408.434.474,

-

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 4.792.408.434.474,- dan Rp3.924.319.941.492,- Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap ini berupa Tanah. Peralatan dan Mesin. Gedung dan Bangunan. dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp75.986.247.258,-

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp75.986.247.258,- dan Rp939.188.803.258,- Mutasi Aset Tetap Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tanah adalah sebagai berikut Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Per 31 Desember 2024 seluas 100.517 m² dengan nilai sebesar Rp.75.986.247.258,- (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 52.919 m² dengan nilai sebesar Rp939.188.803.258,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus

lima puluh delapan rupiah). mutasi tambah seluas 523.998 m² sebesar Rp290.384.782.151,- (dua ratus sembilan puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh satu rupiah) dan mutasi kurang seluas 476.400 m² dengan nilai sebesar Rp.1.153.587.338.151,- (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah). Bertambahnya tanah berasal dari Hibah Masuk dari Pemerintah Daerah NTT dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. sedangkan perubahan kuantitas berasal dari hibah masuk dan koreksi kuantitas atas tanah yang berasal dari hibah masuk dari Pemerintah Daerah Riau. Rincian dapat dilihat di tabel berikut :

Mutasi Tambah Tanah

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

TA 2024

Tabel 29

(Dalam Rupiah)

SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	NILAI PEROLEHAN		Status	Keterangan
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI		
1	2	4	5	6		
131111	TANAH					
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	2	33.380	0	koreksi kuantitas	dari Pemda Riau
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	3	66.620	0	koreksi kuantitas	dari Pemda Riau
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	4	149.100	42.791.673.000	Hibah Masuk	dari Pemda NTT
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	5	31.500	10.442.267.000	Hibah Masuk	dari Pemda NTT
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	6	149.100	42.791.673.000	Hibah Masuk	dari Pemda NTT

SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	NILAI PEROLEHAN		Status	Keterangan
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI		
1	2	4	5	6		
131111	TANAH					
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	7	31.500	10.442.267.000	Hibah Masuk	dari Pemda NTT
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	8	62.798	183.916.902.151	Hibah Masuk	dari Pemprov Sulsel
TOTAL			523.998	290.384.782.151		

Adapun berkurangnya Tanah karena transaksi koreksi pencatatan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan atas kesalahan penginputan kuantitas tanah hibah dari Pemda Riau, kesalahan double pencatatan pada transaksi TAYL atas hibah tanah dari Pemda NTT, koreksi pencatatan atas kesalahan penilaian tanah yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel, serta terdapat transaksi transfer keluar ke RSUP Surabaya, RSUP Makassar dan RSUP Ben Mboi Kupang.. . Rincian dapat dilihat di tabel berikut:

Mutasi Kurang Tanah
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
TA 2024
Tabel 30

SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	NILAI PEROLEHAN		Status	Keterangan
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI		
1	2	4	5	6		
131111	TANAH					
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	2	1	0	Koreksi Pencatatan	hibah pemda Riau
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	3	1	0	Koreksi Pencatatan	hibah pemda Riau
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	4	149.100	42.791.673.000	Koreksi Pencatatan	hibah pemda NTT
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	5	31.500	10.442.267.000	Koreksi Pencatatan	hibah pemda NTT
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	8	0	26.419.518.151	Koreksi Pencatatan	hibah pemda Sulsel
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	6	149.100	42.791.673.000	Transfer Keluar	TK RSUP Ben Mboi Kupang
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	7	31.500	10.442.267.000	Transfer Keluar	TK RSUP Ben Mboi Kupang
2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	8	62.798	157.497.384.000	Transfer Keluar	TK RSUP Makassar
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	52.400	863.202.556.000	Transfer Keluar	TK RSUP Surabaya
TOTAL			476.400	1.153.587.338.151		

*Peralatan dan
Mesin*

*Rp1.037.354.527.00
9,-*

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.037.354.527.009,- dan Rp446.966.628.936 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Peralatan dan Mesin
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

TA 2024

Tabel 30

(Dalam Rupiah)

Mutasi atas peralatan dan mesin				
No.	Uraian	Nilai		
1	Saldo Awal TA 2024			446.966.628.936
2	Mutasi Tambah			
	Pembelian	Rp	732.377.061.012	
	Hibah Masuk	Rp	2.542.934.600	
	Reklas Masuk	Rp	57.700.000	
	Transfer Masuk	Rp	165.390.000	
	Perolehan Lainnya	Rp	126.659.475	
	Reklas KDP menjadi PM	Rp	67.219.850.448	
	Total	Rp	802.489.595.535	
3	Mutasi Kurang			
	Hibah Keluar	-Rp	1.989.697.835	
	Koreksi Pencatatan	-Rp	36.309.414.575	
	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-Rp	880.941.000	
	Reklasifikasi Keluar	-Rp	35.700.000	
	Transfer Keluar	-Rp	172.885.944.052	
	Total	-Rp	212.101.697.462	
3	Saldo Akhir TA 2024			1.037.354.527.009

Gedung dan

Bangunan

Rp185.212.865.222,

-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp185.212.865.222,- dan Rp120.776.287.377 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Gedung dan Bangunan
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
TA 2024
Tabel 31

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Saldo Awal TA 2024	Rp 120.776.287.377
2	Mutasi Tambah	
	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Bangunan Rumah Sakit Umum RSUP Makassar	Rp 1.685.169.215.539
	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Bangunan RSUP dr. Ben Mboi Kupang dan RSUP Vertikal Makassar	Rp 131.349.203.996
	Total	Rp 1.816.518.419.535
3	Mutasi Kurang	
	Transfer Keluar Gedung dan Bangunan kepada RSUP Makassar	-Rp 1.685.169.215.539
	Transfer Keluar Gedung dan Bangunan kepada RSUP Surabaya	-Rp 16.233.422.155
	Transfer Keluar Gedung dan Bangunan pada RSUP dr. Ben Mboi Kupang	-Rp 50.679.203.996
	Total	-Rp 1.752.081.841.690
3	Saldo Akhir TA 2024	Rp 185.212.865.222

Aset Tetap Lainnya

Rp0,-

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp88.000.000 . Rincian aset tetap lainnya:

**Konstruksi Dalam
Pengerjaan**
Rp3.845.551.773.210,-

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.845.551.773.210,- dan Rp2.667.113.714.472,-. Rincian atas Kontruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 36

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Proses pekerjaan sudah selesai tetapi belum bisa dijadikan a tetap dikarenakan belum dapat dilaksanakan pembayaran (tunggakan) dan nilainya sementara masih diverifikasi oleh BPKP, akibat K3 2021	Rp1.897.660.456,00
2	RS UPT Vertikal Surabaya	Rp1.799.497.828.973,00
3	RS UPT Vertikal Papua	Rp656.923.885.124,00
4	RS IKN	Rp811.965.953.922,00
5	Bunker RSUP dr. Ben Mboi Kupang	Rp16.228.246.104,00
6	Infrastruktur Penunjang dan Landscape RSUP dr. Ben Mboi Kupang	Rp19.871.474.896,00
7	KDP RS UPT Vertikal Papua TKTM dari RS Univ Cendrawasih	Rp105.177.752.219,00
8	RSUP Vertikal Riau	Rp14.220.566.786,00
9	Ruang Racik Obat Kemoterapi RSUP dr. J. Leimena Ambon	Rp1.178.378.377,00
10	Landscape RSUP dr. Ben Mboi Kupang Tahap 2	Rp14.579.482.996,00
11	Sitostatika Kemoterapi RS dr. J Leimena Ambon	Rp294.594.595,00
12	Modular Operating Theatre (MOT) Ruang Cathlab - SYAS TECHNOLOGY/Cathlab Clean Room - RSUP Vertikal Makassar	Rp2.890.000.000,00
13	Modular Operating Theatre (MOT) Ruang Operasi - SYAS TECHNOLOGY/SYAS Marine-2 - RSUP Vertikal Makassar	Rp72.000.000.000,00
14	Pengadaan Modular Operating Theatre (MOT) R. Cathlab RS UPT Vertikal Makassar	Rp5.780.000.000,00
15	Mobil Ambulans RS UPT Vertikal Papua	Rp2.980.000.000,00
16	Paket Alat Kesehatan RSUP Vertikal Surabaya (IsDB 1054)	Rp205.602.584.000,00
17	Bebig - Saginova HDR Afterloading System + Cobalt RSUP dr. J. Leimena Ambon	Rp8.183.783.783,00
18	Gondola Single Arm Trackless RS UPT Vertikal Papua	Rp1.207.207.207,00
19	Sistem Gas dan Vakum Medik with Monitoring System RS UPT Vertikal Papua	Rp13.063.063.063,00
20	MOT RSUP dr. J. Leimena Ambon	Rp3.693.751.351,00
21	Prasarana AC RSUP Vertikal Papua	Rp5.108.261.261,00
22	Prasarana Diesel Genset RSUP Vertikal Papua	Rp9.700.000.000,00
23	Prasarana Oksigen Generator RS UPT Vertikal Papua	Rp5.495.495.495,00
24	Sistem Tata Udara RSUP Papua	Rp17.788.288.288,00
25	RS 3 in 1 Makassar	Rp205.602.589.000,00
26	Zenitron 50 Advanced	Rp28.300.000,00
27	Dental X-Ray Panoramic 3D/CBCT - Carestream CS 8100SC 3D with Cephalometric	Rp17.000.000,00
28	ZOIFaraday Series Ceiling Pendant - Electric Single Arm for	Rp8.550.000,00
29	Operating Table MTS-D60 Ortho Neuro Adv RSUP Nusantara IKN	Rp21.800.000,00
30	Loose Furniture RSUP Nusantara IKN	Rp6.024.835.863,00
31	Bipolar Forceps dan Set CTS (Cardiovascular Thoracotomy Surgery) RSUP Makassar	Rp420.037.253,00
32	LAPAROSCOPY DIGESTIF INSTRUMENT dan Sternotomy Set RSUP Makassar	Rp4.731.426.000,00
33	Pengelola kegiatan Dihentikan karena kegiatan berupa "pengelolaan kegiatan" yang tidak bersifat pembangunan fisik. Pada penganggaran sebelumnya seluruh kegiatan pengelolaan kegiatan dimasukkan dalam MAK 53 yang bersifat menambah nilai pekerjaan fisik bangunan (KDP). Namun, pada tahun bersangkutan pekerjaan fisik tidak dilanjutkan sehingga KDP dihentikan. KDP tersebut akan dihapus karena tidak ada wujud bangunan fisik dan masih berupa pengelolaan kegiatan saja, seperti paket meeting, dll.	Rp2.487.415.500,00
34	Pengelola kegiatan Dihentikan karena kegiatan berupa "pengelolaan kegiatan" yang tidak bersifat pembangunan fisik. Pada penganggaran sebelumnya seluruh kegiatan pengelolaan kegiatan dimasukkan dalam MAK 53 yang bersifat menambah nilai pekerjaan fisik bangunan (KDP). Namun, pada tahun bersangkutan pekerjaan fisik tidak dilanjutkan sehingga KDP dihentikan. KDP tersebut akan dihapus karena tidak ada wujud bangunan fisik dan masih berupa pengelolaan kegiatan saja, seperti paket meeting, dll.	Rp1.647.147.800,00
35	Pengelola kegiatan Dihentikan karena kegiatan berupa "pengelolaan kegiatan" yang tidak bersifat pembangunan fisik. Pada penganggaran sebelumnya seluruh kegiatan pengelolaan kegiatan dimasukkan dalam MAK 53 yang bersifat menambah nilai pekerjaan fisik bangunan (KDP). Namun, pada tahun bersangkutan pekerjaan fisik tidak dilanjutkan sehingga KDP dihentikan. KDP tersebut akan dihapus karena tidak ada wujud bangunan fisik dan masih berupa pengelolaan kegiatan saja, seperti paket meeting, dll.	Rp1.143.826.100,00

No	Uraian	Jumlah
36	Pengelola kegiatan Dihentikan karena kegiatan berupa "pengelolaan kegiatan" yang tidak bersifat pembangunan fisik. Pada penganggaran sebelumnya seluruh kegiatan pengelolaan kegiatan dimasukkan dalam MAK 53 yang bersifat menambah nilai pekerjaan fisik bangunan (KDP). Namun, pada tahun bersangkutan pekerjaan fisik tidak dilanjutkan sehingga KDP dihentikan. KDP tersebut akan dihapus karena tidak ada wujud bangunan fisik dan masih berupa pengelolaan kegiatan saja, seperti paket meeting, dll.	Rp37.939.000,00
37	Pengelola kegiatan Dihentikan karena kegiatan berupa "pengelolaan kegiatan" yang tidak bersifat pembangunan fisik. Pada penganggaran sebelumnya seluruh kegiatan pengelolaan kegiatan dimasukkan dalam MAK 53 yang bersifat menambah nilai pekerjaan fisik bangunan (KDP). Namun, pada tahun bersangkutan pekerjaan fisik tidak dilanjutkan sehingga KDP dihentikan. KDP tersebut akan dihapus karena tidak ada wujud bangunan fisik dan masih berupa pengelolaan kegiatan saja, seperti paket meeting, dll.	Rp29.000.000,00
38	PT. INKONEKZI IZI KONSULTAN	Rp125.928.000,00
39	Tidak dilanjutkan karena rumah negara rencana akan dihapuskan dan telah di transfer keluar ke biro umum	Rp46.800.000,00
40	Pengadaan Jassa Konsultan Ruang Kerja Setditjen Yankes	Rp97.350.000,00
41	Renovasi Gedung Adhyatma Lt.4 dan 5	Rp26.306.304.242,00
42	Koreksi Perubahan Nilai Bertambah pada KDP Nomor 9 - RS UPT Vertikal Surabaya	Rp16.320.000,00
43	Penyelesaian KDP peralatan mesin serta gedung dan bangunan	-Rp198.569.054.444,00
Jumlah		3.845.551.773.210

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

(Rp351.696.978.225
, -)

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp351.696.978.225,-) dan (Rp249.813.492.551). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Tabel 37

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

Jenis	Nilai Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan Mesin	1.037.354.527.009	(333.736.548.090)	703.617.978.919
Gedung dan Bangunan	185.212.865.222	(17.960.430.135)	167.252.435.087
Aset Tetap Lainnya		-	-
Jumlah	1.222.567.392.231	(351.696.978.225)	870.870.414.006

Aset Lainnya

Rp563.028.776.788,
-

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp563.028.776.788,- dan Rp657.577.594.097,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Rp14.505.368.674,-

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.505.368.647,- dan Rp18.108.602.067,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa hak cipta, *software*, lisensi dan aset tak berwujud lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel 38

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Software	12.720.474.007	16.323.707.427	(22,07)
Lisensi	1.784.894.640	1.784.894.640	-
Jumlah	14.505.368.647	18.108.602.067	(19,90)

Dana Yang Dibatasi**Penggunaannya**

Rp562.379.783.140,
-

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp562.379.783.140,- dan Rp656.753.356.499,-. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan Saldo RPATA dan saldo dana JAMKESMAS.

Dana Lainnya

Rp6.721.164.939,-

C.3.2.1. Dana Lainnya

Nilai dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6.721.164.939,- dan Rp6.861.302.962,- yang merupakan saldo dana JAMKESMAS Program pemerintah tersebut telah berakhir pada tahun 2014 dan digantikan dengan program BPJS Kesehatan.

Rincian Dana Lainnya**Tabel 39***(dalam rupiah)*

JAMKESMAS	SALDO 31 DES 2023	Setor s.d 31 Desember 2024	Saldo s.d 31 Desember 2024
Rujukan	6.403.051.252	140.138.024	6.262.913.229
Dasar	458.251.710	0	458.251.710
Total	6.861.302.962	140.138.024	6.721.164.939

Dana di Rekening**Penampungan-****Kementerian****lembaga**

Rp555,658,618,201,

-

C.3.2.2. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian lembaga

Nilai Dana di Rekening Penampungan-Kementerian Lembaga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp555,658,618,201,- dan Rp649.892.053.537,- yang merupakan dana yang berada di rekening penampungan KPPN yang ditujukan untuk pembayaran belanja barang dan belanja modal dengan menggunakan mekanisme RPATA. merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekeningpenampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhirtahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Aset Lain-Lain

Rp889.340.677.062,

-

C.3.3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp889.340.677.062,- dan Rp910.639.521.828 . Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional.

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya

(Rp899.956.149.711

,-)

C.3.4. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp899.956.149.711,-) dan (Rp927.923.886.297,-).

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Tabel 40

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Jenis	Nilai Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku
A. Aset Tidak Berwujud			
Software	12.720.474.007	- 12.484.501.010	235.972.997
Lisensi	1.784.894.640	- 1.781.957.856	2.936.784
	14.505.368.647		
B. Aset Lain-Lain			-
Aset Lain-Lain	886.099.774.712	- 885.689.690.845	410.083.867
ATB lain lain			-
Jumlah	900.605.143.359	- 899.956.149.711	648.993.648

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka

Pendek

Rp1,745,135,677,95

3,-

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.745.135.677.953,- dan Rp1.952.831.310.302,- .

Beban barang yang masih harus dibayar Rp1.233.777.065.758,-

C.4.1. Beban barang yang masih harus dibayar

Belanja barang yang masih harus dibayar 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.233.777.065.758,- dan Rp1.233.764.615.758,- Belanja barang yang masih harus dibayar digunakan untuk mencatat utang karena belanja barang yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa.

Tabel 41

Rincian Beban Barang Yang Masih Harus Dibayar

31 Desember 2024

Uraian	SALDO
Beban Barang Yang Masih Harus Dibayar atas Klaim COVID 19	1.233.764.615.758
Belanja atas Honor PMU SHIREEN Bulan Desember 2024 yang terlambat dibayarkan dan akan dibayarkan di tahun 2025	12.450.000
Total	1.233.777.065.758

Hasil reuiu BPKP atas klaim covid 19 kadaluarsa dan klaim pending dibuka kembali tahun 2020 – 2023 dengan nilai kekurangan atas pembayaran sebesar Rp1.233.764.615.758,00 pada 1.192 RS. Kekurangan pembayaran tersebut masih dalam proses pengusulan anggaran ke Kementerian Keuangan.

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya Rp510.960.979.473,-

C.4.2. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

Utang kepada Pihak Ketiga Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp510.960.979.473,- dan Rp719.066.694.544,-.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya:

Tabel 42

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2024	2023
1	RPATA	510.956.571.188	511.909.474.430
2	Utang Pihak Ketiga Lainnya	4.408.000	
3	Koreksi Perubahan Nilai Bertambah terhadap KDP dengan Nomor KDP 9 sebesar Rp. 178.684.216.911,- Nilai tersebut merupakan selisih kenaikan presentase progres pekerjaan pembangunan Fisik RS Surabaya. Nilai yang tercatat di KDP sesuai dengan nilai pembayaran		178.684.216.911
4	Koreksi Perubahan Nilai Bertambah terhadap KDP dengan Nomor KDP 10 sebesar Rp. 28.473.003.203,- Nilai tersebut merupakan selisih kenaikan presentase progres pekerjaan pembangunan Fisik RS Makassar. Nilai yang tercatat di KDP sesuai dengan nilai pembayaran terakhir pada Tanggal 24 Desember 2023 dimana progres pembangunan sebesar 70% dan perhitungan pada 31 Desember 2023 untuk progres pekerjaan pembangunan sebesar 71,795%.		28.473.003.203
	Jumlah	510.960.979.188	719.066.694.544

Dana Pihak Ketiga

Rp0

C.4.3. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp397.632.722,- dan Rp0. Dana pihak ketiga merupakan pengembalian Sisa Kas Hibah Langsung.

Ekuitas

Rp3.747.125.533.48

3,-

C.5 Ekuitas

Ekuitas per per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp3.747.125.533.483,- dan Rp2.795.897.655.445,- . Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp6.154.781.103,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp6.154.781.103,- dan Rp5.370.011.581,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

TA 2024 dan 2023

Tabel 43

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Giro	623.186	96.138.543	(99,35)
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	6.154.157.917	5.273.873.038	16,69
Jumlah	6.154.781.103	5.370.011.581	12,75

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha, pendapatan pendidikan dan Pendapatan Lain-Lain yang merupakan pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

Beban Pegawai

Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran

beban pegawai sudah dilakukan terpusat di Sekjen sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/9301/2022 Tentang Pemindahan Pembayaran Gaji Pegawai Dalam Rangka Pelaksanaan Pembayaran Gaji Terpusat Di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan.

Beban Persediaan D.2 Beban Persediaan

Rp41.855.318.218

, -

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp41.855.318.218,- dan Rp11.161.040.927,- . Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Beban Persediaan

TA 2024 dan 2023

Tabel 45

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	41.855.318.218	11.158.682.427	(275,03)
Beban Persediaan bahan baku	0	966.500	0,01
Beban Persediaan Lainnya	-	1.392.000,00	0,01
Jumlah Beban Persediaan	41.855.318.218	11.161.040.927	275,01

Kenaikan Beban Persediaan tersebut dikarenakan penggabungan satu DIPA satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Beban Barang dan Jasa D.4 Beban Barang dan Jasa

Jasa

Rp229.625.072.92

1,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp229.625.072.921,- dan Rp2.128.790.283.183,-.

Rincian Beban Barang dan Jasa

TA 2024 dan 2023

Tabel 47

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	13.114.119.588	14.199.261.339	-8%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.939.915	35.286.000	-63%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.207.016.050	3.102.494.000	-61%
Beban Barang Operasional Lainnya	9.876.492.363	11.780.742.257	-16%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	252.699.218	-100%
Beban Bahan	27.161.388.383	24.072.171.491	13%
Beban Honor Output Kegiatan	3.571.872.750	2.008.564.000	78%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	6.848.930.811	1.973.172.564.133	-100%
Beban Barang Non Operasional - Pandemi COVID 19	-	-	0%
Beban Langganan Listrik	907.701.824	2.111.423.600	-57%
Beban Langganan Telepon	28.899.916	25.344.519	14%
Beban Jasa Pos dan Giro	4.170.000	4.230.000	-1%
Beban Langganan Air	68.499.200	-	100%
Beban Jasa Konsultan	31.616.574.631	10.840.207.197	192%
Beban Sewa	2.973.039.784	2.272.974.536	31%
Beban Jasa Profesi	13.975.698.424	6.210.370.000	125%
Beban Jasa Lainnya	118.181.489.524	78.671.725.184	50%
Beban peralatan mesin ekstrakomptabel	54.239.758	-	100%
Beban aset tetap lainnya ekstrakomptabel	22.000.000	-	100%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	-	30.225.709	-100%
Jumlah	229.625.072.921	2.128.790.283.183	-89%

Beban

Pemeliharaan

Rp6.800.834.030,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.800.834.030,- dan Rp2.796.002.328,-.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023
Tabel 48

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.026.384.678	0	100%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.457.430.602	2.742.309.348	(10,39)
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	299.955.650	0	100%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.038.100	23.425.500	(27,27)
Beban Persediaan suku cadang	0	0	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	25.000	30.267.480	(99,92)
Jumlah	6.800.834.030	2.796.002.328	143,23

Beban Perjalanan Dinas D.6 Beban Perjalanan Dinas

Dinas

Rp162.940.944.935,-
5,-

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing - masing sebesar Rp162.940.944.935,- dan Rp136.828.801.893,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023
Tabel 49

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban perjalanan biasa	90.484.842.281	70.371.321.983	28,58
Beban perjalanan dinas dalam kota	994.584.000	1.013.349.800	(1,85)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.883.809.850	16.308.399.198	28,06
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	48.404.866.307	46.491.857.630	4,11
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.172.842.497	1.773.864.060	22,49
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	870.009.222	(100,00)
Jumlah	162.940.944.935	136.828.801.893	19,08

Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp95.450.399.514
, -

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp95.450.399.514,- dan Rp870.680.203.085. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 TA 2024 dan 2023

Tabel 50

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Jasa	0	1.589.491.029	100,00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	95.450.399.514	867.671.506.549	(89,00)
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	959.354.632	(100,00)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	459.850.875	(100,00)
Jumlah	95.450.399.514	870.680.203.085	(812,18)

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp148.539.530.31
1,-

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp148.539.530.311,- dan Rp74.431.980.247,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023
Tabel 53

(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban penyusutan peralatan dan Mesin	144.929.342.694	66.286.942.529	118,64
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	3.435.746.459	6.556.009.437	(47,59)
Beban Amortisasi Hak Cipta	-	-	-
Beban Amortisasi Software	124.480.088	95.357.932	30,54
Beban Amortisasi Lisensi	489.464	89.489.464,00	
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	49.471.606	1.404.180.885	(96,48)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	148.539.530.311	74.431.980.247	99,56

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Rp46.338.768,-

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp46.338.768,- dan Rp0,- . Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2024 dan 2023
Tabel 54

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	46.338.768	49.500	93.513,67
Jumlah	46.338.768	49.500	93.514

Defisit dari Kegiatan Pelepasan Aset Non Lancar (Rp73.940,880.292,-)

D.10 Surplus/Defisit dari Kegiatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari pendapatan dan beban berasal dari keuntungan atau kerugian dari Pelepasan Aset Non Lancar Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayananana

Kesehatan. Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Pelepasan Aset Non Lancar

TA 2024 dan 2023

Tabel 55

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar	435.402.000	217.369.877	100,30
Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar	-73.926.282.292	-17.720.068.246	317,19
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-73.490.880.292	-17.502.698.369	319,88

Surplus/Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp35.190.526.975
,-

D.11 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Pelepasan Aset Non Lancar

TA 2024 dan 2023

Tabel 56

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari kegiatan operasional			
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	33.894.785.466	58.720.368.876	-4228%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	84.020.000	55.000.000	5276%
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	100.000.000	44.384.853	12530%
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	1.195.350.000	-	100%
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan operasional	35.274.155.466	58.819.753.729	-4003%
Beban dari kegiatan operasional			
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	83.628.491	55.335	
Jumlah Beban dari Kegiatan operasional	83.628.491	55.335,00	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	35.190.526.975	58.819.698.394	-40

Pos Luar Biasa **D.12 Pos Luar Biasa**

Nihil

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023.

Surplus/Defisit

D.12 Surplus/Defisit

(Rp717.404.010.911,-)

Jumlah Surplus / Defisit untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp717.404.010.911,-) dan (Rp3.178.001.300.057,-).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp2.795.897.655.445,-.

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing Rp2.795.897.655.445 dan Rp2.368.121.232.128.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Defisit LO

(Rp717.404.010.911,-)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar (Rp717.404.010.911,-) dan (Rp3.178.001.300.057,-). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp39.454.715.200,-

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.815.964.489.195,- dan Rp0. Koreksi nilai persediaan ini berasal

dari Direktorat Fasyankes mencatat persediaan melalui menu Saldo Awal atas barang yang diberikan oleh Pusat Krisis tahun 2023.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,- **E.4.3. Koreksi Atas Reklasifikasi**
Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Selisih Revaluasi Aset Rp0,- **E.4.4. Selisih Revaluasi Aset**
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp43.038.262.534,- **E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset selain karena revaluasi. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp43.038.262.534,- dan Rp0,-. Koreksi ini antara lain terdiri dari Koreksi pembatalan hibah yang dikarenakan koreksi akun hibah masuk menjadi hibah TAYL atas Hibah Tanah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bertempat di Jalan Viquam Kelurahan Manuai II Kecamatan Alak Kota Kupang, koreksi pencatatan karena kesalahan pencatatan nama dan kode barang, koreksi pencatatan nilai berkurang tanah bangunan rumah sakit, Koreksi Perubahan Nilai Bertambah karena terdapat inputan terhadap Izin Konstruksi Fasilitas Radioterapi menggunakan Linear Accelerator (LINAC) dan Brakhiterapi Pembangunan RS UPT Vertikal Surabaya yang terinput pada KDP RS UPT Vertikal Makassar;

Koreksi Lain-lain (Rp28.790.547.490,-) **E.4.6. Koreksi Lain-lain**
Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp28.790.547.490,-) dan (Rp4.716.679.056,-). Koreksi ini antara lain terdiri dari Koreksi saldo dana yang dibatasi penggunaannya berkurang karena ada

penyetoran saldo dana JAMKESMAS dari RS Marinir Cilandak, Rumkit Kesdam IM dan RSIA Melinda Hospital Bandung, koreksi penyesuaian penyetoran atas Belanja barang dibayar dimuka pembayaran Klaim Covid 19, Koreksi Penyesuaian belanja dibayar dimuka kelebihan bayar klaim Covid 19 menjadi Piutang lainnya;

Transaksi Antar **E.5. Transaksi Antar Entitas**

Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Rp1.614.929.458.705,- adalah Rp1.614.929.458.705,- dan Rp3.610.492.582.577,-. Terdiri dari:

1. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (Rp820.171.273,-)
2. Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu Rp239.583.001,851,- dengan rincian sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai
Hibah barang dari DAI Fleming Fund Countert Grant to Indonesia	1.248.230.250
Hibah dalam negeri Pemprov NTT (RS Ben Mboi) 180.600 m2	53.233.940.000
Hibah dalam negeri Pemprov Sulawesi Selatan (RS Makassar) 62.798 m2	183.916.902.151
Hibah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa kontainer di RSUD Cengkareng (UNDP)	1.183.929.450
Jumlah	239.583.001.851

Terdapat koreksi pada hibah Pemprov Sulawesi Selatan menjadi Rp157.497.384.000,-

3. Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp101.521.017.855,-. Dengan rincian sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai
Pengesahan Kas Hibah Langsung Tunai (TAB)	15.016.896
Pengesahan Kas Hibah Langsung Tunai (TAB)	28.746.587
Pengesahan Hibah Jasa Dalam Bentuk Jasa dari Fleming Fund Country Grant to Indonesia Sesuai dengan SP3HL-BJS Nomor: KU.03.01/D.VII/81/2024 Tanggal 22 Januari 2024	36.444.541.485
Pengesahan Hibah Jasa Dalam Bentuk Jasa dari World Health Organization (WHO) Sesuai dengan SP3HL-BJS Nomor: KU.03.01/D.VII/328/2024 Tanggal 22 Mei 2024	3.982.128.474
Pengesahan Kas Hibah Langsung Tunai (TAB)	103.049.991
Pengesahan Kas Hibah Langsung Tunai (TAB)	450.000.000
Pengesahan Kas Hibah Langsung Tunai (TAB)	1.580.353.222
Pengesahan Kas Hibah Langsung Tunai (TAB)	2.849.407.200
Pengesahan Hibah Jasa Dalam Bentuk Jasa Berupa Jasa dari USAID Sesuai Dengan SP3HL-BJS Nomor: KU.01.03/D.VII/1115/2024 Tanggal 27 Desember 2024	39.317.677.126
Pengesahan Hibah Jasa dalam bentuk jasa dari Fleming Fund Country Grant to Indonesia sesuai dengan SP3HL-BJS Nomor: KU.01.03/D.VII/1185/2024 tanggal 31 Desember 2024	13.937.321.974
Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri dalam Bentuk Barang TA 2024 Register Nomor 2CVP2REA sesuai MOU Nomor 27.10.2022 Tanggal 27 Oktober 2022.	110.774.900
Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa berupa Jasa Konsultan Dukungan Strategi Agenda Transformasi Kesehatan Tony Blair Institute 2024 sesuai SP3HL-BJS nomor KU.01.03/D.VII/1226/2024 tanggal 31 Desember 2024	2.702.000.000
Jumlah	101.521.017.855

4. Transfer keluar sebesar (Rp2.935.314.374.364,-) berupa peralatan mesin, tanah, gedung bangunan kepada satker vertikal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
5. Transfer masuk sebesar (Rp148.851.000)
6. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp4.320.610.553.639,- dan Diterima dari Entitas Lain (Rp49.937.226.426,-).

Ekuitas Akhir

Rp

3.747.125.533.48
3,-

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.747.125.533.483,- dan Rp2.795.897.655.445,-.

1. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Terdapat pinjaman luar negeri Indonesia-*Supporting Primary and Referral Health Care Reform* (I-SPHERE) dengan pemberi pinjaman adalah Bank Dunia (*World Bank*). Nama proyek tersebut adalah *Indonesia-Supporting Primary and Referral Health Care Reform* (I-SPHERE) dengan Loan ID 8873-ID, nomor register 1B4ND8ZA, dan telah ditandatangani oleh Menkeu dan Country Director Bank Dunia Jakarta pada tanggal 17 Juli 2018. Pinjaman tersebut mulai efektif berlaku pada tanggal 09 Oktober 2018 dan berakhir pada tanggal 30 April 2024. Nilai pinjaman sebesar USD 150.000.000. Pelaksana kegiatan atas pinjaman tersebut adalah Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan rumah sakit vertikal di wilayah timur. Realisasi I-SPHERE sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp789.485.077.513,- atau sebesar 97,39 persen dari alokasi sebesar Rp810.670.003.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50
Rincian Isphere
31 Desember 2024

KANTOR PUSAT	Pagu	Realisasi	%	SISA PAGU
I-SPHERE :	810.670.003.000	789.485.077.513	97,39%	21.184.925.487
Pembangunan RS Papua	478.278.226.000	477.609.909.439	99,86%	668.316.561
Dukungan PLN RS UPT Vertikal Propinsi Papua	246.287.681.000	232.270.928.914	94,31%	14.016.752.086
Dukungan PLN untuk Alkes RS UPT Vertikal Propinsi NTT	41.664.618.000	40.139.816.065	96,34%	1.524.801.935
Dukungan PLN untuk Alkes RS UPT Vertikal Propinsi Maluku	18.750.813.000	18.740.101.958	99,94%	10.711.042
Dukungan RSUPT Vertikal Papua	5.602.700.000	5.602.600.239	100,00%	99.761
Dukungan Manajemen Program/Proyek I-SPHERE	6.054.375.000	5.105.933.789	84,33%	948.441.211
Dukungan Manajemen Proyek PMU dan Sekretariat ISPHERE	1.711.280.000	1.451.947.837	84,85%	259.332.163
Dukungan Officer PLN terkait DLI untuk Pembangunan RS UPT Vertikal	3.110.343.000	2.931.920.704	94,26%	178.422.296
Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alkes dalam rangka Pembangunan RSUPT Vertikal Baru	1.954.202.000	371.222.737	19,00%	1.582.979.263
Reviu Pelaksanaan Kegiatan Program I-SPHERE dengan PJ Disbursement Linked Indicator (DLI)	1.050.138.000	1.010.257.000	96,20%	39.881.000
Misi Bank Dunia, Field Visit dan Evaluasi Triwulanan Program Proyek I-SPHERE	1.207.400.000	1.123.935.325	93,09%	83.464.675
Verifikasi Capaian Target DLI	1.036.585.000	809.547.133	78,10%	227.037.867
Dukungan Officer PLN terkait Pembangunan RS UPT Vertikal di Kawasan Timur Indonesia	731.950.000	692.544.594	94,62%	39.405.406
Riviu Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Program/Proyek I-SPHERE	240.490.000	239.885.115	99,75%	604.885
Evaluasi, Dokumentasi dan Pengarsipan Program/Proyek ISPHERE	227.400.000	227.280.000	99,95%	120.000
Penghematan Perjalanan Dinas (Kebijakan S1023/MK.02/2024)	1.015.871.000	-	0,00%	1.015.871.000
Perjadiin Persiapan PHTC	1.745.931.000	1.157.246.664	66,28%	588.684.336

2. Terdapat pinjaman luar negeri dari *Islamic Development Bank (IsDB)*. Tanggal penandatanganan perjanjian adalah 8 Desember 2020 dan tanggal efektifnya 18 Maret 2021, sedangkan *closing date* pinjaman ini tanggal 6 Juni 2026. Serta Loan ID serta Nomor Register pinjaman tersebut adalah IDN-1054 dan 15A3839A. Tanggal penandatanganan perjanjian adalah 8 Februari 2023 dan tanggal efektifnya 30 Mei 2023, sedangkan *closing date* pinjaman ini tanggal 6 Juni 2026. *Executing Agency* pinjaman Luar Negeri ini Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Berikut rincian satker penerima, alokasi dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp438.176.413.692,- dari anggaran Rp447.098.042.000,- untuk Kantor Pusat.

Tabel 51
Realisasi PLN ISDB
31 Desember 2024

No	No	KANTOR PUSAT	Pagu	Realisasi	%
A	1	Kegiatan IsDB	447.098.042.000	438.176.413.692	98,00%
1	a	IsDB IDN-1031	19.316.573.000	16.992.500.386	87,97%
		Belanja Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya	17.519.285.000	15.610.950.000	89,11%
		Belanja Operasional	1.797.288.000	1.381.550.386	76,87%
	b	IsDB IDN-1054	427.781.469.000	421.183.913.306	98,46%
		Belanja Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya	14.195.798.000	7.985.101.915	56,25%
		Belanja Operasional	2.212.498.000	1.828.989.743	82,67%
		Belanja Modal	166.000.000	164.648.648	99,19%
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin RS 3in1 Surabaya	205.603.584.000	205.602.584.000	100,00%
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin RS 3in1 Makassar	205.603.589.000	205.602.589.000	100,00%

3. Terdapat ketidaksesuaian kode akun dan kode barang pada satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebanyak 24 baris. Rincian ketidaksesuaian akun tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 52
Ketidaksesuaian Kode Akun
31 Desember 2024

No	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Permasalahan
1	BASTNONKONTRAKTUAL	01625/UP_TUP/466080/2024	11-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Layanan dan Perkantoran PMU SIHREN berupa Scanner Dokumen, Projector, dan Paper Shredder (IWB)	3050105015	1	887.388,00	887.388,00	241821701009848	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
2	BASTNONKONTRAKTUAL	01724/UP_TUP/466080/2024	16-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Kesehatan Gelas Ukur 50 ml RS UPT Vertikal Makassar	3070199999	1	326.340,00	326.340,00	241821701012006	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
3	BASTNONKONTRAKTUAL	01803/UP_TUP/466080/2024	02-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Mebelair Perkantoran RS Makassar	3050206088	1	817.880,00	817.880,00	241821701013292	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
4	BASTNONKONTRAKTUAL	01823/UP_TUP/466080/2024	25-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Kesehatan Erlenmeyer RS UPT Vertikal Makassar	3080111999	1	335.000,00	335.000,00	241821701012006	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
5	BASTNONKONTRAKTUAL	01836/UP_TUP/466080/2024	26-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Kesehatan pencetakan kapsul RS UPT Vertikal Makassar	3080119999	1	545.000,00	545.000,00	241821701012006	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
6	BASTNONKONTRAKTUAL	01837/UP_TUP/466080/2024	26-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Kesehatan Pinset dan Scissors (blunt/sharp points, curved points) RS UPT Vertikal Makassar	3070104999	1	417.000,00	417.000,00	241821701012006	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
7	BASTNONKONTRAKTUAL	01837/UP_TUP/466080/2024	26-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Kesehatan Pinset dan Scissors (blunt/sharp points, curved points) RS UPT Vertikal Makassar	3070104999	1	170.000,00	170.000,00	241821701012006	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
8	BASTNONKONTRAKTUAL	01845/UP_TUP/466080/2024	27-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Nierbechen dan Resusator dewasa	3070101105	3	52.800,00	158.400,00	241821701013537	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
9	BASTNONKONTRAKTUAL	01866/UP_TUP/466080/2024	30-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Glucose Meter RS UPT Vertikal Makassar	3070108094	1	250.000,00	250.000,00	241821701013316	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
10	BASTNONKONTRAKTUAL	01878/UP_TUP/466080/2024	30-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pembelian barang rumah tangga	6050101006	10	2.200.000,00	22.000.000,00	241821701013293	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
11	BASTNONKONTRAKTUAL	01903/UP_TUP/466080/2024	31-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Pita ukur	3070299999	2	116.875,00	233.750,00	241821701013537	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
12	BASTNONKONTRAKTUAL	01915/UP_TUP/466080/2024	31-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Gunting Bedah RS UPT Vertikal Surabaya	3070104999	1	287.000,00	287.000,00	241821701013537	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
13	BASTNONKONTRAKTUAL	01929/UP_TUP/466080/2024	31-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Kesehatan Pispot RS UPT Vertikal Makassar	3070101114	1	600.000,00	600.000,00	241821701013316	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
14	BAST KONTRAKTUAL	BI.01.04/D.I.15/1206/2024	13-09-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pengadaan Modular Operating Theatre (MOT) RS UPT Vertikal Surabaya	3070199999	6	6.000.000.000,00	36.000.000.000,00	241821302033983	Belanja menggunakan kode akun untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan tetapi tercatat sebagai kode Peralatan dan Mesin
15	BAST KONTRAKTUAL	BI.01.04/D.V.9/2278/2024	04-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Peralatan Kantor RS UPT Vertikal Provinsi Papua	3050299999	100	310.000,00	31.000.000,00	241402401000329	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
16	BAST KONTRAKTUAL	BI.01.04/D.V.9/2379/2024	19-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Peralatan Kantor RS UPT Vertikal Provinsi Papua	3050105038	6	737.000,00	4.422.000,00	241402401000415	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
17	BAST KONTRAKTUAL	BI.01.04/D.V.9/2656/2024	19-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Peralatan Kantor RS UPT Vertikal Provinsi Papua	3050199999	10	139.000,00	1.390.000,00	241402401000412	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
18	BAST KONTRAKTUAL	BI.01.04/D.V.9/2656/2024	19-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Peralatan Kantor RS UPT Vertikal Provinsi Papua	3050199999	10	320.000,00	3.200.000,00	241402401000412	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
19	BAST KONTRAKTUAL	BI.01.04/D.V.9/2656/2024	19-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Peralatan Kantor RS UPT Vertikal Provinsi Papua	3050199999	10	260.000,00	2.600.000,00	241402401000412	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
20	BAST KONTRAKTUAL	BI.01.04/D.V.9/2656/2024	19-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Peralatan Kantor RS UPT Vertikal Provinsi Papua	3050199999	10	111.000,00	1.110.000,00	241402401000412	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
21	BAST KONTRAKTUAL	BI.01.04/D.V.9/2656/2024	19-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Peralatan Kantor RS UPT Vertikal Provinsi Papua	3050199999	10	320.000,00	3.200.000,00	241402401000412	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
22	BAST KONTRAKTUAL	BI.01.04/D.V.9/2656/2024	19-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Peralatan Kantor RS UPT Vertikal Provinsi Papua	3050199999	10	139.000,00	1.390.000,00	241402401000412	Belanja barang ekstrakomptabel yang tercatat pada pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

4. Terdapat pinjaman luar negeri Indonesia- Indonesia Health Systems Strengthening Project (IHSS) pada Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan pemberi

pinjaman adalah Bank Dunia (World Bank) dengan Loan ID Ln962. Tanggal penandatanganan dan tanggal efektifnya perjanjian tersebut adalah 31 Desember 2024, sedangkan closing date pinjaman ini tanggal 30 Juni 2029. Pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan Loan ID L0787A ditandatangani tanggal 29 Desember 2023, tanggal efektifnya 6 Februari 2024 dan closing date tanggal 30 Juni 2029. Serta pinjaman dari Islamic Development Bank (IsDB) Loan ID IDN-1070 tanggal penandatanganan 31 Januari 2024, tanggal efektif 5 April 2024 dan closing date pada tanggal 30 Juni 2029. Realisasi IHSS sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp12.792.127.898,- atau sebesar 1,31 persen dari alokasi sebesar Rp976.013.075.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53
Realisasi Kegiatan IHSS
31 Desember 2024

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%	Sisa Pagu
	Kegiatan IHSS	976.013.075.000	12.792.127.898	1,31%	963.220.947.102
1	WB (IBRD)	395.982.141.000	10.824.531.937	2,73%	385.157.609.063
2	AIIB	371.432.405.000	-	0,00%	371.432.405.000
3	IsDB	208.598.529.000	1.967.595.961	0,94%	206.630.933.039

5. Nilai persediaan yang tidak dikuasai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.923.063.013,- merupakan barang yang telah didistribusikan kepada masyarakat atau pemerintah daerah dan dilengkapi dengan usulan BAST, namun belum proses hibah, dalam proses persetujuan hibah dan dalam proses naskah hibah pada tiga direktorat. Pada Ditjen Yankes, terdapat persediaan yang tidak dikuasai per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.923.063.013,- sudah dikeluarkan dari Neraca namun masih tercatat pada SAKTI. Persediaan yang tidak dikuasai tersebut merupakan barang yang telah didistribusikan kepada masyarakat atau pemerintah daerah dan dilengkapi dengan usulan BAST, namun proses penerbitan SK hibah belum selesai, dengan nilai pada masing-masing direktorat Per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel Daftar Persediaan Tidak dikuasai pada SAKTI pada Satker Ditjen Yankes

Tabel 54

Persediaan Tidak dikuasai

31 Desember 2024

No	Nama Direktorat	Jumlah Persediaan Tidak dikuasai
1	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp 2.062.768.100
2	Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer	Rp 4.862.330
3	Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 11.855.432.583
	TOTAL	Rp 13.923.063.013



